

Menlu Sugiono: Tidak Ada Tarif Kapal di Selat Malaka

Category: EKONOMI

written by Redaksi | April 24, 2026



SEANTERONEWS.com – Pemerintah Indonesia secara resmi menegaskan posisi tegas terkait wacana penerapan tarif bagi kapal-kapal yang melintasi [Selat Malaka](#). Menteri Luar Negeri ([Menlu](#)) Sugiono memastikan bahwa Indonesia tidak akan mengenakan biaya atau tarif apapun terhadap kapal yang melintasi jalur pelayaran strategis tersebut.

Pernyataan ini sekaligus menjadi klarifikasi resmi pemerintah untuk mengakhiri spekulasi publik yang muncul pasca-wacana tersebut. Menlu Sugiono menegaskan bahwa langkah ini diambil guna menjaga prinsip kebebasan navigasi sesuai dengan hukum internasional.

Menjaga Stabilitas Perdagangan Global

Selat Malaka merupakan salah satu urat nadi perdagangan dunia yang menghubungkan Asia Timur, Timur Tengah, dan Eropa. [Menlu](#)

Sugiono menekankan bahwa Selat Malaka adalah jalur pelayaran tersibuk yang memerlukan komitmen kolektif untuk menjaga kelancaran lalu lintas.

“Pemerintah berkomitmen untuk menjaga stabilitas dan kelancaran perdagangan global. Kebijakan yang berpotensi menghambat arus lalu lintas kapal, termasuk penerapan tarif, tidak akan dilakukan demi kepatuhan terhadap hukum internasional dan menjaga hubungan diplomatik yang baik,” ujar Menlu Sugiono dalam pernyataannya.

Klarifikasi Terhadap Wacana Sebelumnya

Sebelumnya, sempat muncul gagasan dari Menteri Keuangan Purbaya mengenai potensi penerapan tarif bagi kapal yang melintas, merujuk pada konsep pengelolaan sektor maritim di wilayah lain seperti Selat Hormuz. Namun, wacana tersebut memicu diskusi kompleks terkait implikasi hukum dan politik internasional.

Dalam hukum laut internasional, Selat Malaka diatur di bawah prinsip transit passage. Prinsip ini memberikan hak bagi kapal internasional untuk melintas tanpa hambatan selama memenuhi ketentuan keselamatan dan keamanan yang berlaku. Penerapan tarif secara sepihak dinilai tidak sejalan dengan komitmen Indonesia dalam menjaga sistem perdagangan global yang terbuka.

Komitmen Kerjasama Trilateral

Keputusan untuk tidak menerapkan tarif juga didasari oleh pentingnya menjaga hubungan strategis dengan negara tetangga, yakni Malaysia dan Singapura. Ketiga negara selama ini telah membangun kerja sama trilateral yang solid untuk memastikan keamanan dan keselamatan pelayaran di kawasan tersebut.

Pemerintah Indonesia menilai bahwa kerja sama yang harmonis lebih memberikan dampak positif dibandingkan kebijakan sepihak

yang berpotensi mengganggu keseimbangan kawasan. Selain itu, Indonesia melihat bahwa stabilitas jalur logistik justru memberikan manfaat ekonomi jangka panjang yang lebih berkelanjutan bagi industri maritim nasional.

Peran Indonesia sebagai Negara Maritim

Keputusan ini memberikan sinyal positif bagi komunitas perdagangan internasional. Dengan menjaga keterbukaan Selat Malaka, Indonesia mempertegas posisinya sebagai negara maritim yang bertanggung jawab dan mendukung efisiensi perdagangan global.

Alih-alih membebankan tarif, Indonesia berkomitmen untuk memfokuskan kebijakan maritim ke depan pada peningkatan aspek keamanan, keselamatan pelayaran, dan efisiensi operasional. Langkah ini diharapkan mampu memperkuat kepercayaan pasar global serta menjaga peran Indonesia sebagai penjaga salah satu jalur pelayaran paling krusial di dunia.[]